**DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA KEPADA ARAB SAUDI TENTANG PENAMBAHAN KUOTA HAJI INDONESIA**

Annas Faundra, Dra. Christy Damayanti, M.Si., Halifa Haqqi, S.IP., MA.

13430017

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

***ABSTRACT***

Indonesian bilateral diplomacy with Saudi Arabian reinforces bilateral communication or establish Government to Government negotiation with Saudi Arabian and involves not only Government to Government but also Non-government, Hajj travel agent, in which hajj quota reduction in 2013 was also brought into Multilateral discussion in OKI forum. The theories employed by author were diplomacy, Government to Government, and negotiation approaches. The author employed a descriptive qualitative approach; the data employed consisted of primary and secondary data from a variety of sources related to Indonesia Government Diplomacy to Saudi Arabian about the increase of Indonesian Hajj quota. The method of collecting data used was interview and document study. From the result of research, it could be concluded that Indonesia conducted diplomacy with Saudi Arabian using bilateral diplomacy including Government to Government Negotiation, non-government negotiation with Hajj travel agent, and multilaterally in OKI forum.

Keywords: Bilateral Diplomacy, Multilateral Diplomacy, Negotiation, Hajj Quota

**PENDAHULUAN**

Negara berperan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan kepuasan kepada masyarakatnya. Seperti halnya dalam Ibadaha haji, indonesia dikenal sebagai masyarakat beragama islam terbesar dan hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sangatlah baik. Kerjasama Indonesia dengan Arab saudi memliki berbagai kesulitan karena berbeda dengan dalam lingkup hidupnya ataupun kebudayaannya.

KH. Ahmad Dahlan adalah tokoh ulama besar di Indonesia dan beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau melakukan haji pertamakali ketika umur 15 tahun karena KH. Ahmad Dahlan begitu banyak pengalaman pada saat itu Muhammadiyah diangkat sebagai penolong haji pada tahun 1912. Kolonial Belanda juga pernah menghentikan Ibadah haji karena administrasi yang begitu mahal. Pada saat itu aktor ulama seperti KH Ahmad Dahlan san pediri Muhamadiyah dan KH Hasyim Asj’ari sang pendiri Nahdatul Ulama (NU) melakukan Diplomasi kepada kolonial Belanda agar bisa melakukan haji dan hasilnya telah melakukan Diplomasi mereka berdua bisa melanjutkan para jemaah ketika pada jaman penjajah kolonial Belanda. Jadi disini aktor Diplomasi seperti ulama sangat pentig

Pemerintahan Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar dalam penyelengaraan haji karena setiap tahunnya mengalami naik turunya jumlah jemaah haji.maka pada sampai tahun ini Negara Indonesia mempererat hubungan dengan kerajaan Arab Saudi agar para jama’ah Haji aman dan terlindungi dari hal yang tidak di inginkan. Saat ini biro haji juga berperan aktif dalam kerjasama antara kedua Negara untuk mempererat hubungan dengan kerjaan arab Saudi karena biro haji Indonesia selalu mengerimkan jama’ah haji dan mengirimkan jama’ah umroh disetiap tahunnya dalam hal itu biro haji maupun biro umroh sudah bekerjasama dengan biro yang berada diarab saudi, hal ini juga sangat bermanfaat dalam hubungan bilateral antara kedua negara Indonesia dan kerajaan arab saudi.

Hubungan terjalin karena Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan RI pasca penjajahan dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dengan begituIndonesia secara keseluruhan merasa didukung untuk membangun negara yang baru bangkit daari penjajahan yang berlangsung selama bertahun-tahun, dukungan tersebut kemudian membuka jalan bagi kedua negara untuk berkerabat dengan baik yang pada mulanya hanya secara informal, namun seiring dengan berjalannya hubungan baik tersebut maka ditingkatkan menjadi Hubungan Diplomatik

Hubungan Indonesia dengan Arab saudi telah berjalan dengan lama dan sudah berkembang dengan baik juga menghasilkan kerjasama yang sangat banyak dan hal tersebut juga disetujui kedua Negara. Hal ini juga tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang kebanyakannya masyarkat berama Islam walau secra resmi bukan bergama Islam. Hubungan terjalin karena Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan RI pasca penjajahan dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan menjadi Negara yang berdaulat.

Masjidil Haram telah di renovasi agar meningkatkan kapasitas dengan daya tampung yang banyak dan yang di renovasi pada lantai Ibadah Tawaf dan hal ini agar Masjidl Haram terlihat bagus dan indah, beberapa tiang yang ada dan renovasi dilakukan 40%. Pemerintah Indonesia mengetahui dengan adanya pemotongan jemaah Haji langsung melakukan Negosiasi dan Presiden Inndonesia mengirimkan menterinya agar melakukan Diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi membahas hal tersebut tetapi dengan hal itu Negara Indonesia tidak bisa menghindari dengan adanya pemotongan karena memang renovasi yang dilakukan Arab Saudi memang belum selesai.Kementerian Agama telah menjelaskan jika pembangunan tahap pertama selesai, akan berlangsungnya dengan pembangunan tahap kedua, kemudian tahap ketiga jadi setiap tahap renovasi itu kemungkinan dilakukan dalam waktu satu tahun. Oleh karena itu penyelesaian renovasi akan selesai setidak tidaknya diperkirakan pada tahun 2016.

Dengan halnya Pemerintah Arab Saudi meminta kepada semua Negara yang menjadi calon jemaah haji agar perpanjangan waktu hal ini Pemerintah Indonesia tidak hanya diam saja langsung melakukan Negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi dengan hal ini peserta jemaah haji mengalami menunggu belasan tahun makan Pemerintah Indonesia meminta ketika sudah selesai kuota Haji khususnya Negara Indonesia di gandakan dua kalipat dan Pemerintah Indonesia meminta kepada Penyelengara haji Indonesia memberikan pengarahan kepada calon jemaah haji dengan kasus ini karena memang tidak bisa dihindari

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti ingin memaprkan mengenai bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi mengenai penambahan kuota haji.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitia kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang sistematif untuk membantu seseorang peneliti menghasilkan penelitian koheren yang merujuk pada pengumpulan data numerik. Data yang digunakan merupakan wawancara,observasi, dokumen atau arsip. Metode kualitatif dimaksudkan yang mengambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang berbentuk bahasa lisan atau tertulis dan tidak diformalkan menjadi angka (Umar. S. Bakrie 2016).

Penelitian Kualitatif mengkaji prespektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel guna mamahami fenomena sosisal dari sudut pandang partisipan.penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk peneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen objek kunci (Sugiyono, 2005) .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan dan sekaligus menganalisa “Diplomasi pemerintah indonesia kepada Arab Saudi tentang penambahan kuota haji indonesia”. Pengumpulan data dilakukan melalui buku, jurnal, wawancara, hasil-hasil,penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya.

**HASIL DAN PEMABAHASAN**

Pemerintah adalah sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya suatu diplomasi dalam mewujudkan perdamaian dan bertanggungjawab akan wilayahnya dalam mewujudkan perdamaian dunia (Salamah 2011, 47). Pemerintah dalam multijalur ini dapat dianggap sebagai ‘pengendara’ yakni mengendarakan power yang dimiliki negara dari pemerintah asal. Keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram mengakibatkan pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat ibadah tawaf. Hal ini sudah di Negosiasikan oleh Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Diplomasi Bilateral Indonesia dengan Arab Saudi memperkuat komunikasi Bilateral atau melakukan Negosiasi*Goverment to Goverment* dengan Arab Saudi dan melibatkan tidak hanya Goverment to Goverment tetapi juga melibatkan Non Goverment yaitu Biro Haji,Isu pemotongan kuota haji tahun 2013 ini juga dibawa ke Multilateral yaitu di forum OKI.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengirimkan mengirimkan menterinya untuk melakukan Negosiasi terhadap Pemerintah Arab Saudi dalam hal penambahan kuota haji agar tidak adanya potongan kuota haji. Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk meminta tidak dikurangi sampai 20%.

Pemerintah Indonesai melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi disini terjalin pertemuan antara Pemerintah dengan Pemerintah karena sebagai aktor penting suatu Negara dalam pertemuan ini Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Arab Saudi membatalkan pemotongan kuota jemaah haji khusus Indonesia. apabila pemotongan tidak bisa terhindari, Pemerintah Indonesia akan meminta kuota haji Indonesia pada 2014 dsebesar 120 %. Pemerintah Indonesia akan menuntut kerugian pada pemerintah Arab Saudi karena pemerintah Arab Saudi, terlambat dalam mengambil keputusan akibat Masjidil Haram tidak bisa selesai masa renovasinya pada masa haji.

Pemerintah berupaya negosiasi agar jemaah haji Indonesia tidak terkena pemotongan kuota. Hal tersebut dilakukan dengan menggelar pertemuan antara Kementerian Agama RI dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi tetapi memang hal ini tidak bisa dihindari jadi penyelesaian Pembangunan berlangsung sampai 2016 dan Pemerintah Indonesia meminta kepada semua panitia haji diseluruh Indonesia arag mensosialisasikan kepada semua calon jemaah haji Indonesia dalam Pemotongan kuota haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

**PENUTUP**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka pada penelitian ini dapat di tarik kesimpulan dibawah ini tentang Diplomasi Pemerintahan Indonesia Kepada Arab Saudi tentang penambahan kouta haji indonesia adalah Diplomasi Bilateral Indonesia dengan Arab Saudi memperkuat komunikasi Bilateral atau melakukan Negosiasi dengan Arab Saudi dan melibatkan tidak hanya Goverment to Goverment tetapi juga melibatkan Non Goverment yaitu Biro Haji karena pihak Non Pemerintah yang terkena dampak Pengurangan kuota Haji tahun 2013.Isu pemotiongan kuota haji tahun 2013 ini dibawa ke Multilateral yaitu di forum OKI meskipun keputusan sepenuhnya ada pada Arab Saudi.Sebagai kesimpulan tambahan pemotongan kuota haji tahun 2013 nin berdampak kepada Pemerintah yaitu kredibilitas menjadi tidak baik dimata masyarakat, Swasta yaitu juga mengalami kerugian dan calon Jemaah Haji Indonesia menunggu semakin lama hingga belasan tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fifiyanti, D. 2012. “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Dana Talangan Calon

Ibadah Haji Dan Umrah. Cirebon: Swagati Press, p.5

S.L.Roy,Diplomasi,1991.Penerjemah Herwanto, Mirsawati. Jakarta : Rajawali Pres,

Widyani, R., and Pribadi, M. (2007). Definisi Haji Dan Umrah. Dalam: Panduan

1999, Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Citra Umbaran, Bandung

2008 Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2008 tentang

[www.kemenag.co.id](http://www.kemenag.co.id)